



**ANALISA TERHADAP PENGGALIAN POTENSI PERPAJAKAN
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK SURABAYA TEGALSARI DALAM KAITANNYA
DENGAN PERLUASAN SUMBER PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL
DARI FISKAL LUAR NEGERI**

LAPORAN TUGAS AKHIR MAGANG

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
gelar Ahli Madya (A/Md) Perpajakan
Program Diploma III Perpajakan
pada
Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

Wisnu Doncosuryo
NIM. 970903101001

Asal	: Hadiah	Klas 352013 PON a
Terima Tgl:	13 JUL 2000	
No. Induk :	10.2.363	

**PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2000

PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN TUGAS AKHIR MAGANG

Nama : Wisnu Poncosuryo
Nim : 970903101001
Jurusan : Diploma III Perpajakan / S0
Judul : Analisa terhadap penggalian potensi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari dalam kaitannya dengan sumber penerimaan negara yang berasal dari Fiskal Luar Negeri

Dosen Pembimbing : Drs. Djoko Poernomo M.Si

Disetujui di Jember
Pada tanggal : 24 Juni 2000

Dosen Pembimbing



Drs Djoko Poernomo M.Si

PENGESAHAN

Nama : Wisnu Poncosuryo
Nim : 970903101001
Program Studi : Diploma III Perpajakan

ANALISA TERHADAP PENGGALIAN POTENSI PERPAJAKAN
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK SURABAYA TEGALSARI
DALAM KAITANNYA DENGAN SUMBER PENERIMAAN NEGARA
YANG BERASAL DARI FISKAL LUAR NEGERI

Telah dipertahankan di hadapan sidang panitia penguji laporan
akhir magang Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Hari : Jum`at
Tanggal : 30 Juni 2000
Pukul : 18.00-19.00

dan telah dinyatakan lulus

Panitia Penguji

Ketua

Drs. Djoko Poernomo M.Si
NIP: 131.660.777

Anggota

Drs. H. Hartono Djulianto.
NIP: 130.610.497

Mengetahui

Dekan



Prof. Drs. H. BARIMAN
NIP: 130.350.769

MOTTO :

“ Maka apabila engkau telah selesai dari
suatu urusan. Maka kerjakanlah
urusan yang lain dengan bersungguh-sungguh “

(Q.S ke 94 : 8)

Al Qur`an dan Terjemahan, 1997. Jakarta. Sari Agung

Halaman Persembahan

Laporan ini penulis persembahkan kepada :

- Bapak dan Ibu yang selalu memberikan doa dan kasih sayang nya .
- Bapak dan Ibu pengajar yang mulia, semoga Allah membalas jasa-jasamu .
- Dik Atik, Seno dan Arjuno tersayang, kalian pemberi motivasi dan semangat dalam hidupku.
- Teman-temanku “ agung, santo, husen, wahyu, joko, juga ndari, diah, nyak, lia, thanks serta teman - teman DIII Perpajakan semuanya, untuk keceriaannya selama ini .
- Almamaterku tercinta .

Kata Pengantar

Bismilahirrohmanirrohim

Puji syukur kehadirat Allah SWT & sholawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW karena atas berkat rahmat-Nyalah penulis dapat menyusun laporan tugas akhir ini dengan Judul "*Analisa terhadap Penggalan potensi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari dalam kaitannya dengan perluasan sumber penerimaan negara yang berasal dari Fiskal Luar Negeri*", sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan pada Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari, bahwa penulisan laporan ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak . Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Bariman selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Sasongko selaku ketua Program Diploma III Perpajakan.
3. Bapak Drs. Djoko Poernomo M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan laporan ini.
4. Bapak Drs. Johannes Latuputty selaku Kepala KPP Surabaya Tegalsari beserta staf, karyawan dan karyawan yang telah bersedia memberikan ijin dan membantu dalam penyusunan laporan akhir ini.

5. Segenap dosen, karyawan dan Civitas Akademika Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
6. Ayahanda dan ibunda tercinta yang telah memberikan dorongan dengan disertai doa.
7. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan laporan akhir ini.

Walaupun dalam laporan akhir ini penulis telah berusaha sebaik mungkin, namun sebagai manusia biasa penulis tidak bisa lepas dari kesalahan dan kekurangan . Oleh sebab itu saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis perlukan.

Akhirnya penulis berharap, semoga laporan akhir ini bermanfaat bagi semua pihak. Wasalamualaikum, wr,wb.

Jember, 24 Juni 2000

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Program Magang.....	3
1.2.1 Tujuan Program Magang	3
1.2.2 Kegunaan Program Magang.....	4
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Hal-hal yang berkaitan dengan pengertian umum Fiskal Luar Negeri	5
2.2 Tata cara pembayaran Fiskal Luar Negeri	5
2.3 Perlakuan pembayaran Fiskal Luar Negeri bagi Orang Pribadi yang bertolak ke Luar Negeri sebagai Kredit Pajak	6
2.4 Pengecualian Pembayaran Fiskal Luar Negeri	7
2.4.1 Pengecualian dengan Pembebasan Langsung ...	7
2.4.2 Pengecualian melalui Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri.....	9

BAB III TAHAP PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

3.1 Tahap Persiapan	13
3.2 Tahap Pengumpulan Data	14
3.3 Tahap Pengolahan Data	15
3.4 Tahap Analisa Data	15
3.5 Tahap Kesimpulan	15

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI MAGANG

4.1 Sejarah Singkat KPP Surabaya Tegalsari	16
4.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	20
4.3 Uraian Tugas Sumber Data Utama	27
4.4 Permasalahan	30
4.5 Pembahasan	31
4.6 Alternatif Pemecahan Masalah	39

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	41
5.2 Saran	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Daftar Tabel

1. Statistik jumlah Wajib Pajak terdaftar.
2. Lalu lintas penumpang penerbangan dalam negeri menurut asal dan tujuan.
3. Lalu lintas penumpang penerbangan luar negeri menurut pelabuhan udara.
4. Banyaknya Penduduk Indonesia yang berangkat ke luar negeri menurut jenis paspor tahun 1998.
5. Banyaknya Penduduk Indonesia yang berangkat ke luar negeri menurut Unit Pelaksana Teknis tahun 1998

Daftar Bagan

1. Struktur organisasi di bawah Menteri Keuangan.
2. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak.
3. Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari.
4. Alur penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
5. Proses pemanfaatan data ekstensifikasi Wajib Pajak.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat permohonan ijin magang mahasiswa DIII Perpajakan FISIP Universitas Jember.
2. Surat pelaksanaan kegiatan magang.
3. Surat tugas pelaksanaan magang.
4. Surat praktek kerja lapangan mahasiswa D III Perpajakan dari KPP Surabaya Tegalsari.
5. Jadwal magang D III Perpajakan FISIP Universitas Jember.
6. Daftar rekapitulasi kehadiran dan nilai efektifitas praktek peserta D III Perpajakan FISIP Universitas Jember.
7. Daftar kegiatan / tugas penilaian peserta program D III Perpajakan FISIP Universitas Jember.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah krisis moneter melanda Indonesia 2 tahun yang lalu praktis kebijakan moneter tidak berfungsi lagi . Banyak sekali sektor - sektor swasta yang terkena imbasnya . Perusahaan-perusahaan kecil berguguran perusahaan-perusahaan besar tumbang sehingga dampaknya juga berpengaruh pada penerimaan negara .

Pajak di masa yang akan datang punya peran penting yang jauh lebih besar lagi bagi bangsa Indonesia, karena disamping untuk membiayai pembangunan nasional dan roda pemerintahan , juga sekaligus untuk membayar hutang-hutang Indonesia pada tahun lampau . Namun sayang , bahwa perpajakan itu sendiri masih banyak mengandung kelemahan dimana sistem Self Assessmentnya masih banyak mengandung kontraksi yang justru pada akhirnya akan menurunkan penerimaan negara .

Dilihat dari trend perkembangannya, penerimaan dari sektor pajak dari tahun ke tahun selalu terjadi peningkatan . Oleh karena itu perlu terus diupayakan peningkatan penerimaan pajak baik melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak . Intensifikasi pajak dapat dilakukan dengan cara penanganan potensi fiskal secara tertib dan berkesinambungan, sedang untuk Ekstensifikasi dapat dicapai melalui peningkatan jumlah wajib pajak khususnya pada sektor - sektor usaha baru yang belum terjangkau.

Untuk mencapai keberhasilan tersebut maka peran serta seluruh lapisan masyarakat termasuk dalam golongan berbagai macam profesi apapun mempunyai arti penting dan strategis

sebagai penunjang tugas Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugasnya untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak. Seperti halnya yang penerimaan pajak yang berasal dari Fiskal Luar Negeri seperti yang dilansir oleh Kakanwil IV Direktorat Jenderal Pajak Baharuddin di Jakarta (majalah berita pajak edisi 1 Agustus 1999) perlu diadakan pemeriksaan sederhana lapangan agar dapat menjaring wajib pajak nakal dan mencegah kebocoran

Namun kondisi saat ini dan masa mendatang merupakan tantangan bagi sektor pajak. Krisis ekonomi telah menyebabkan kondisi makro ekonomi mengalami kemerosotan. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang minus telah membawa hampir 80 % dunia usaha kolaps. Di sektor pajak dapat dirasakan telah dikeluarkannya berbagai kebijakan sebagai respon atas kondisi ekonomi yang belum jelas arahnya, seperti fasilitas pemberian keringanan atau mungkin penundaan pembayaran pajak.

Kesinambungan roda pembangunan memang harus dipertahankan . Salah satunya dengan menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan dalam negeri selain migas. Disinilah peran pajak diharapkan mampu menopang target pembangunan nasional dengan biaya sendiri sebagai wujud kemandirian bangsa .

Pertanyaan yang timbul, apakah sekarang ada kemungkinan penerimaan pajak untuk dinaikkan, padahal penerimaan pajak tergantung pada kegiatan ekonomi ?, Jawabannya, menurut Direktur Jenderal Pajak A, Anshari Ritonga, yang penulis kutip dari majalah berita pajak edisi 1 Agustus 1999, tanpa ada pertumbuhan ekonomi pun berdasarkan indikator-indikator yang ada secara optimis sektor pajak dapat digenjot penerimaannya. Indikator-indikator tersebut antara lain :

1. Tax Ratio dan tingkat efisiensi pemungutan pajak di Indonesia masih rendah. Tingkat Tax Ratio kira-kira 15,2 % sedangkan angka banding antara penerimaan pajak dengan produk nasional bruto minimal yang ideal adalah 20 %. Sementara masih rendahnya tingkat efisiensi dapat dilihat dari relisasi penerimaan pajak yang masih jauh dari potensi pajak yang ada.
2. Tax Coverage Ratio juga masih sangat rendah, kira-kira 55 % . Padahal di negara-negara ASEAN minimal sudah 80 %.
3. Adanya kebijaksanaan lain di balik krisis ekonomi, seperti pembayaran upah pesangon, pembebasan utang dari kreditur INDRA, pembayaran perekonomian rakyat, dan lain-lain.

Indikator tersebut mungkin ada benarnya, yang pasti bagi Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi yang menangani sektor perpajakan, pelaksanaan ekstensifikasi di bidang perpajakan (baik subyek atau obyek) sudah seharusnya menduduki urutan prioritas. Adapun ekstensifikasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari dapat dibuatkan definisi sebagai upaya / kegiatan penggalan potensi pajak dengan cara memperluas jangkauan pengenaan pajak sehingga didapat sumber-sumber pajak baru. Atas dasar itulah penulis mengambil judul "*Analisa terhadap penggalan potensi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari dalam kaitannya dengan perluasan sumber penerimaan negara yang berasal dari Fiskal Luar Negeri*".

1.2. Tujuan dan Kegunaan Program Magang

1.2.1. Tujuan Program Magang

Tujuan program magang adalah ingin :

1. Mendapatkan pengalaman dan juga sebagai latihan kerja bagi penulis khususnya di bidang perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari.
2. Membandingkan antara teori-teori perpajakan yang diterima di bangku kuliah dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.
3. Mengetahui kendala-kendala yang terjadi di lapangan dan mengetahui upaya-upaya apa yang telah dan akan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari.

1.2.2. Kegunaan Program Magang

Kegunaan Program Magang adalah untuk :

1. Menambah wawasan tentang perpajakan khususnya yang berkaitan dengan Fiskal Luar Negeri.
2. Menambah pengalaman dalam bentuk paktek yang sebenarnya di lapangan khususnya yang berkaitan dengan Fiskal Luar Negeri.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Hal-hal yang Berkaitan dengan Pengertian Umum Fiskal Luar Negeri

Fiskal Luar Negeri merupakan Pajak Penghasilan (PPh) yang wajib dibayar oleh Orang Pribadi setiap kali akan berangkat ke luar negeri. Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perubahan tarif Fiskal Luar Negeri mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 1998. Sesuai PP No. 17 Tahun 1998, Besarnya Fiskal Luar Negeri yang harus dibayar Orang Pribadi yang bertolak ke Luar Negeri adalah sebesar :

- a) Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah), untuk setiap kali perjalanan dengan menggunakan pesawat udara.
- b) Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), untuk setiap kali perjalanan dengan menggunakan kapal laut.
- c) Rp 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk setiap kali perjalanan dengan menggunakan perjalanan darat.

2.2. Tata Cara Pembayaran Fiskal Luar Negeri

Adapun Tata Cara Pembayaran Fiskal Luar Negeri yang dilakukan Orang Pribadi yang bertolak ke Luar Negeri sesuai PP No 46 Th 1994 adalah sebagai berikut :

- 1) Pembayaran Fiskal Luar Negeri yang dilakukan oleh Orang Pribadi yang bertolak ke Luar Negeri dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (Keputusan Menteri Keuangan No 638/KMK.04/1994) atau dengan melunasi Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri. (Keputusan Menteri Keuangan No 929/KMK.04/1994)

- 2) Pembayaran Fiskal Luar Negeri dengan menggunakan Surat Setoran Pajak wajib dilakukan pada Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro yang ada di kota pelabuhan atau tempat pemberangkatan.
- 3) Pembayaran Fiskal Luar Negeri dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri selain dapat dilakukan pada Bank Persepsi dapat pula dilakukan di Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri di pelabuhan atau tempat pemberangkatan.
- 4) Pembayaran Fiskal Luar Negeri bagi Orang Pribadi, NPWP yang dicantumkan adalah NPWP Kepala Keluarga , Apabila Kepala Keluarga tidak mempunyai NPWP maka NPWP yang dicantumkan adalah 0.000.000.00-XXX (kode KPP dimana Kepala Keluarga bertempat tinggal.
- 5) Pembayaran Fiskal Luar Negeri yang ditanggung Pemberi Kerja, NPWP yang dicantumkan adalah NPWP Pemberi Kerja.

2.3. Perlakuan Pembayaran Fiskal Luar Negeri bagi Orang Pribadi yang bertolak ke Luar Negeri sebagai Kredit Pajak.

- A. Pembayaran Fiskal Luar Negeri bagi Wajib Pajak Dalam Negeri merupakan Pembayaran PPh Pasal 25 yang dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang pada SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan.
- B. Pembayaran Fiskal Luar Negeri bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak mempunyai NPWP dapat dikreditkan dengan syarat Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk memperoleh NPWP serta menyampaikan SPT

Tahunan PPh ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Domisili Wajib Pajak.

C. Pembayaran Fiskal Luar Negeri bagi karyawan (tidak termasuk istri dan anak), yang ditanggung pemberi kerja merupakan angsuran PPh Pasal 25 bagi Pemberi Kerja yang dapat dikreditkan terhadap PPh terutang dalam SPT Tahunan PPh Pemberi Kerja untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan syarat :

- Pada Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri dicantumkan identitas Orang Pribadi yang bertolak ke Luar Negeri q.q. Pemberi Kerja.
- NPWP yang dicantumkan adalah NPWP Pemberi Kerja.

2.4. Pengecualian Pembayaran Fiskal Luar Negeri

2.4.1. Berdasarkan SE 15/PJ.41/1995 Pengecualian Pembayaran Fiskal Luar Negeri yang dilakukan dengan Pembebasan Langsung yaitu diberikan oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas di pelabuhan atau tempat pemberangkatan ke luar negeri. Adapun untuk Pembebasan Langsung diberikan kepada :

a. Anggota Korps Diplomatik, Pegawai Perwakilan Negara Asing, Staf dari Badan-badan Perserikatan Bangsa-bangsa, tenaga ahli dalam rangka kerjasama teknik dan staf dari Badan / Organisasi Internasional yang mendapat persetujuan pemerintah RI, yang berangkat keluar negeri dengan menggunakan Paspor Diplomatik, sepanjang bukan Warga Negara Indonesia dan disamping jabatan resminya tidak melakukan pekerjaan lain atau kegiatan usaha di Indonesia (Keputusan Menteri Keuangan No SP/99./PD/XI/72 tanggal 2 Juni 1972).

- b. Istri dan anak-anak yang :
- belum berusia 25 tahun
 - belum kawin
 - tidak mempunyai mata pencaharian
 - masih menjadi tanggungan dan tinggal di wilayah akreditasi serta pembantu rumah tangga

Dari mereka tersebut pada butir a, sepanjang bukan WNI dan dalam rangka keberangkatan untuk penempatan di luar negeri (Keputusan Menteri Keuangan No SP/99./PD/XI/72 tanggal 2 Juni 1972).

- c. Pejabat Negara, Anggota ABRI dan PNS yang bertolak keluar negeri dalam rangka perjalanan dinas yang menggunakan paspor dinas, dan dilengkapi dengan surat tugas atau surat perjalanan dinas ke luar negeri dari instansi / kesatuan yang berangkutan, untuk setiap kali keberangkatan, tidak termasuk pembantu rumah tangga.
- d. Pejabat Negara, Anggota ABRI dan PNS termasuk istri dan anak-anaknya yang :
- belum berusia 25 tahun
 - belum kawin
 - tidak mempunyai mata pencaharian
 - masih menjadi tanggungan dan tinggal di wilayah akreditasi dalam rangka penempatannya di luar negeri.
- e. Anggota ABRI yang bertugas sebagai Pasukan Perserikatan Bangsa-bangsa atau dalam rangka latihan bersama dengan pasukan negara lain di luar negeri.
- f. Petugas imigrasi yang melakukan tugas pendataan keimigrasian diatas pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional.

- g. Jemaah haji yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Departemen Agama dan petugas pelaksana pemberangkatan haji yang pembiayaannya di bebaskan pada dana ONH.
- h. Para pekerja WNI yang akan bekerja di luar negeri dalam rangka pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atas persetujuan / rekomendasi Departemen Tenaga Kerja yang telah disahkan oleh Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri di kota pelabuhan / pemberangkatan.
- i. Penduduk Indonesia yang bertempat tinggal tetap di daerah perbatasan yang melakukan perjalanan lintas batas wilayah RI.
- j. Orang asing yang berada di Indonesia dengan visa turis, transit, sosial budaya, kunjungan usaha dan tidak menerima / memperoleh penghasilan di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- k. Orang asing yang karena sesuatu hal di perintahkan oleh pemerintah Indonesia untuk meninggalkan wilayah Indonesia.
- l. Awak dari pesawat terbang dan kapal laut serta kendaraan umum angkutan darat yang beroperasi di jalur Internasional atau melakukan penerbangan, pelayaran dan operasi berdasarkan perjanjian charter pengangkutan.

2.4.2. Berdasarkan SE 15/PJ.41/1995 Pengecualian Pembayaran Fiskal Luar Negeri dapat dilakukan dengan Pembebasan melalui Pemberian Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN). Pembebasan melalui Pemberian Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN) di berikan kepada :

- a. Anggota ABRI dan PNS yang bertugas di bidang keamanan dan pelayanan pemerintahan di daerah perbatasan yang melaksanakan tugas dinas keluar negeri dalam rangka

- kerjasama dengan negara yang berbatasan, dengan menyerahkan surat tugas dari atasan langsung.
- b. Anggota misi kesenian, olah raga atau keagamaan yang mewakili pemerintah Republik Indonesia (Keputusan Menteri Keuangan No 392/KMK.04/1999). untuk :
- Mengikuti festival kesenian dan kebudayaan yang diikuti oleh lebih dari satu negara dengan persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Mengikuti pertandingan olahraga dalam rangka Olimpiade, ASEAN GAMES, SEA GAMES, pertandingan olahraga penderita cacat dengan persetujuan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.
 - Mengikuti konferensi atau perlombaan di bidang keagamaan dengan persetujuan Menteri Agama.
- c. Mahasiswa atau pelajar Indonesia yang akan belajar keluar negeri serta guru Indonesia dalam rangka program resmi pertukaran mahasiswa, pelajar atau guru yang jangka waktunya lebih dari satu bulan yang diselenggarakan pemerintah atau badan asing dengan persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. Penduduk Indonesia yang bertempat tinggal tetap di Pulau Batam dan memiliki KTP yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang di Pulau Batam, sepanjang mereka telah dipotong PPh oleh pemberi kerja atau telah terdaftar sebagai wajib pajak dan telah memenuhi kewajiban pajak penghasilannya pada Kantor Pelayanan Pajak Batam.
- e. WNI yang bertempat tinggal tetap di luar negeri yang memiliki tanda pengenal resmi sebagai penduduk negeri tersebut dan tidak menerima / memperoleh penghasilan dari Indonesia ,

sepanjang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan pembebasan tersebut hanya diberikan untuk 2 kali masa 1 tahun.

Ketentuan ini juga berlaku bagi Pejabat Negara, Anggota ABRI dan PNS dalam rangka tugas belajar di luar negeri yang pada waktu cuti pulang ke Indonesia, maka waktu kembali ke luar negeri di kelompokkan dalam status penduduk luar negeri karena sudah berdomisili tetap di luar negeri berdasarkan surat keterangan dari Kedutaan Besar RI di luar negeri.

- f. Tenaga kerja WNA pendatang yang bekerja di Pulau Batam, Pulau Bintan dan Pulau Karimun sepanjang mereka telah dipotong PPh Pasal 21 / 26 oleh pemberi kerja.
- g. Orang asing yang menerima penghasilan dari Indonesia yang tidak bermaksud menetap di Indonesia dan berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan sepanjang atas penghasilan tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 oleh pemberi kerja.
- h. Mahasiswa atau pelajar asing yang berada di Indonesia dalam rangka belajar dengan rekomendasi dari pimpinan sekolah atau perguruan tinggi yang bersangkutan dan tidak menerima / memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- i. Penyandang cacat atau orang sakit yang akan berobat ke luar negeri atas biaya organisasi sosial termasuk 1 orang pendamping dengan persetujuan Menteri Kesehatan.
- j. Orang asing yang berada di Indonesia dalam rangka :
 - Melakukan penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan di bawah organisasi LIPI / Lembaga resmi pemerintah lainnya serta DEPDIKBUD, sepanjang tidak menerima / memperoleh penghasilan di Indonesia.

- Pelaksanaan program kerjasama teknik dengan mendapat persetujuan sekretariat kabinet serta tidak berlaku bagi istri dan anak-anaknya.
- Melakukan tugas sebagai anggota misi keagamaan di bawah koordinasi Departemen Keagamaan dan misi kemanusiaan di bawah koordinasi Departemen Sosial serta tidak menerima / memperoleh penghasilan di Indonesia.
- Mereka yang menurut Pasal 3 huruf a dan b PP No 46 tahun 1994 di kecualikan dari kewajiban membayar Pajak Penghasilan pasal 25 pada waktu berangkat ke luar negeri tetapi tidak menggunakan Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas dengan menyerahkan rekomendasi dari Badan/Organisasi Internasional yang bersangkutan.

BAB III

TAHAP PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

3.1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, yang dilakukan penulis sebelum pelaksanaan program magang diantaranya :

1. Menentukan tempat dan waktu pelaksanaan magang.

Tempat magang yang penulis pilih adalah Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari yang berada di Gedung Keuangan Negara (GKN) II lantai 1-3 di jalan Dinoyo No. 111 Surabaya. Pelaksanaan magang ini dimulai tanggal 26 Januari 2000 sampai dengan 26 Februari 2000, yang terdiri dari 6 (enam) peserta magang termasuk penulis.

2. Mengikuti pembekalan yang dilaksanakan oleh pihak fakultas.

Pembekalan yang diadakan oleh fakultas dilaksanakan sebelum pelaksanaan program magang . Dalam pembekalan tersebut diuraikan mengenai gambaran umum tentang bagaimana pelaksanaan magang di lapangan, juga disertai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan magang .

3. Pelaksanaan magang

Pada saat pelaksanaan magang, penulis mempersiapkan data-data yang penulis peroleh pada saat kuliah . Atas dasar data tersebut penulis mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis ambil untuk keperluan penulisan laporan ini. Untuk mencari data pelengkap dan data penunjang lainnya, penulis oleh pihak KPP Surabaya Tegalsari ditempatkan pada 8 (delapan) seksi, yang dilakukan berdasarkan

penjadwalan. (Pengelompokan, pembagian waktu di setiap seksi beserta penilaian dapat dilihat di daftar lampiran).

3.2. Tahap Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu : *data primer* dan *data sekunder* . *Data primer* adalah data yang diperoleh langsung dari informasi di lapangan yang dalam hal ini adalah KPP Surabaya Tegalsari. Sedangkan *data sekunder* adalah data yang penulis dapatkan melalui studi pustaka. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

A. Teknik Observasi secara langsung

Yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti.

B. Teknik Wawancara atau Interview

Yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait khususnya dengan petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari .Hal ini di maksudkan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya di lapangan.

C. Teknik Studi Pustaka

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari buku-buku, literatur-literatur, buku referensi yang ada yang dapat menjadi pedoman bagi penulisan laporan ini. Data-data tersebut penulis peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

3.3. Tahap Pengolahan Data

Pada tahap ini penulis melakukan pengolahan terhadap data yang penulis peroleh pada saat magang. Data-data yang penulis peroleh kemudian penulis kelompokkan / di kategorisasikan sesuai dengan kebutuhan penulis. Pengolahan data ini di lakukan baik secara *statistik* maupun *non statistik*. *Non statistik* maksudnya yaitu dengan mencari prosentase dan rasio (perbandingan), sedangkan *statistik* maksudnya semua data dimasukkan secara terperinci berdasarkan urutan tertentu.

3.4. Tahap Analisa Data

Seperti yang telah penulis kemukakan dimuka bahwa, disini penulis menggunakan *metode analisa dekriptif* . Dengan menggunakan teknik ini penulis dapat memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai suatu dokumen. Dokumen-dokumen yang berisi data tersebut diteliti untuk kemudian diklasifikasikan menurut kriteria tertentu.

3.5. Tahap Kesimpulan

Untuk tahap ini, kesimpulan yang diambil harus disesuaikan dengan permasalahan. Melalui kesimpulan ini didapat inti dari permasalahan dan alternatif jalan pemecahannya berdasarkan data yang diperoleh pada saat magang.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI MAGANG

4.1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari .

Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang penyerahan kekuasaannya diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Kantor Pajak yang ada pada waktu itu disebut Kantor Inspeksi Keuangan Di wilayah Indonesia Timur, pada saat itu Kantor Inspeksi Keuangan hanya meliputi wilayah :

- A. Kotamadya Surabaya
- B. Kabupaten Sidoarjo
- C. Kabupaten Mojokerto
- D. Kabupaten Jombang
- E. Kabupaten Bangkalan
- F. Kabupaten Pamekasan

Sejak tahun 1967, Kantor Inspeksi Keuangan Surabaya berubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak Surabaya. Dan pada tahun 1970 Kantor Inspeksi Pajak Surabaya di pecah menjadi dua yaitu menjadi :

1. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya, wilayah kerjanya meliputi Kotamadya Surabaya dan Pembantu Gubernur Madura.
2. Kantor Inspeksi Pajak Mojokerto, wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Gresik.

Seiring dengan perkembangan industri dan perdagangan yang cukup pesat di Surabaya, maka Kantor Inspeksi Pajak dipecah menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Utara.
2. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Selatan.
3. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Timur.

Baru bulan Juni 1988 bertambah dengan Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Barat . Tetapi pada tahun 1989 dengan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.276/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, maka Kantor Inspeksi Pajak berubah menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

- a. Kantor Pelayanan Pajak.
- b. Unit Pemeriksa dan Penyidikan Pajak

sehingga pada tahun 1989 di Surabaya memiliki 4 Kantor Pelayanan Pajak yaitu :

- A. Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Utara, wilayah kerjanya meliputi :
 - Kecamatan Semampir
 - Kecamatan Krembangan
 - Kecamatan Pabean Cantikan
 - Kecamatan Bubutan
 - Madura
- B. Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Timur, wilayah kerjanya meliputi :
 - Kecamatan Rungkut
 - Kecamatan Sukolilo
 - Kecamatan Simokerto
 - Kecamatan Kenjeran
 - Kecamatan Tambaksari
 - Kecamatan Gubeng

C. Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Selatan, wilayah kerjanya meliputi :

- Kecamatan Genteng
- Kecamatan Tegalsari
- Kecamatan Wonokromo
- Kecamatan Wonocolo

D. Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Barat, wilayah kerjanya meliputi :

- Kecamatan Sawahan
- Kecamatan Tandes
- Kecamatan Benowo

Sesuai dengan perkembangan ekonomi yang cukup pesat di Surabaya, maka untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, Dirjen Pajak merasa perlu untuk menambah jumlah Kantor Pelayanan Pajak di Surabaya . Sehingga di Surabaya memiliki 6 (enam) Kantor Pelayanan Pajak yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Krembangan
2. Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng
3. Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Genteng
4. Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Wonocolo
5. Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari
6. Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Sukomanunggal

Dengan perkembangan tugas yang semakin bertambah seiring dengan meningkatnya potensi ekonomi Kotamadya Surabaya, maka dalam reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1994, Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari ditingkatkan fungsinya dari Kantor Pelayanan Pajak tipe B menjadi Kantor Pelayanan Pajak tipe A sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan tahun 1994.

Untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang mengalami peningkatan status sesuai keputusan Menteri Keuangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menyetujui pembangunan gedung baru yang digunakan sebagai kantor bagi Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari. Tegalsari yang dulunya termasuk wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Selatan sekarang telah berdiri sendiri menjadi Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari dengan menempati Gedung Keuangan Negara (GKN) II lantai 1-3 di jalan Dinoyo 111 Surabaya dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Asemrowo, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Tegalsari dan kecamatan Dukuh Pakis.

Selama perjalanan dan perkembangan Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari telah berhasil menjangkau wajib pajak di wilayah kerjanya, sehingga jumlah wajib pajak yang terdaftar dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1

TABEL 1
STATISTIK JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR

Jenis Pajak	Per 1-01-97	Per 1-01-98	Per 1-01-99
PPh Perseorangan	8.105	8.437	8.832
PPh Badan	3.028	3.394	3.712
PPh Pasal 21	3.928	4.098	4.467
PPh Pasal 22	5	8	8
PPh Pasal 23	3.853	4.085	4.450
PPN	2.269	2.778	2.977
Jumlah	21.188	22.800	24.446

Sumber : KPP Surabaya Tegalsar

4.2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

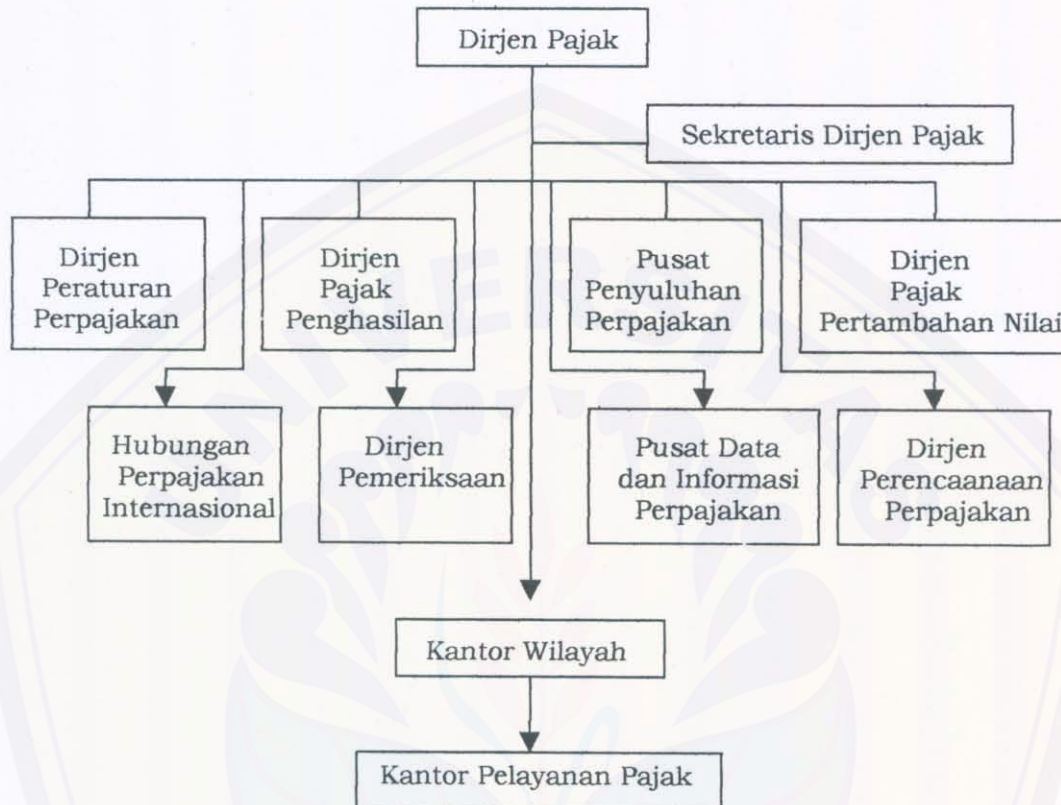
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 758/KMK/01/1993 tanggal 3 Agustus 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak yang memuat struktur organisasi mulai dari Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Moneter, Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah sampai Kantor Pelayanan Pajak yang semuanya berkedudukan dibawah naungan Menteri Keuangan (tampak pada bagan 1).

BAGAN 1
STRUKTUR ORGANISASI DI BAWAH MENTERI KEUANGAN



Untuk selanjutnya dibawah Dirjen Pajak adalah Sekretaris Dirjen Pajak yang bertugas memberikan pelayanan yang bersifat teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Adapun struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak tampak pada bagan 2.

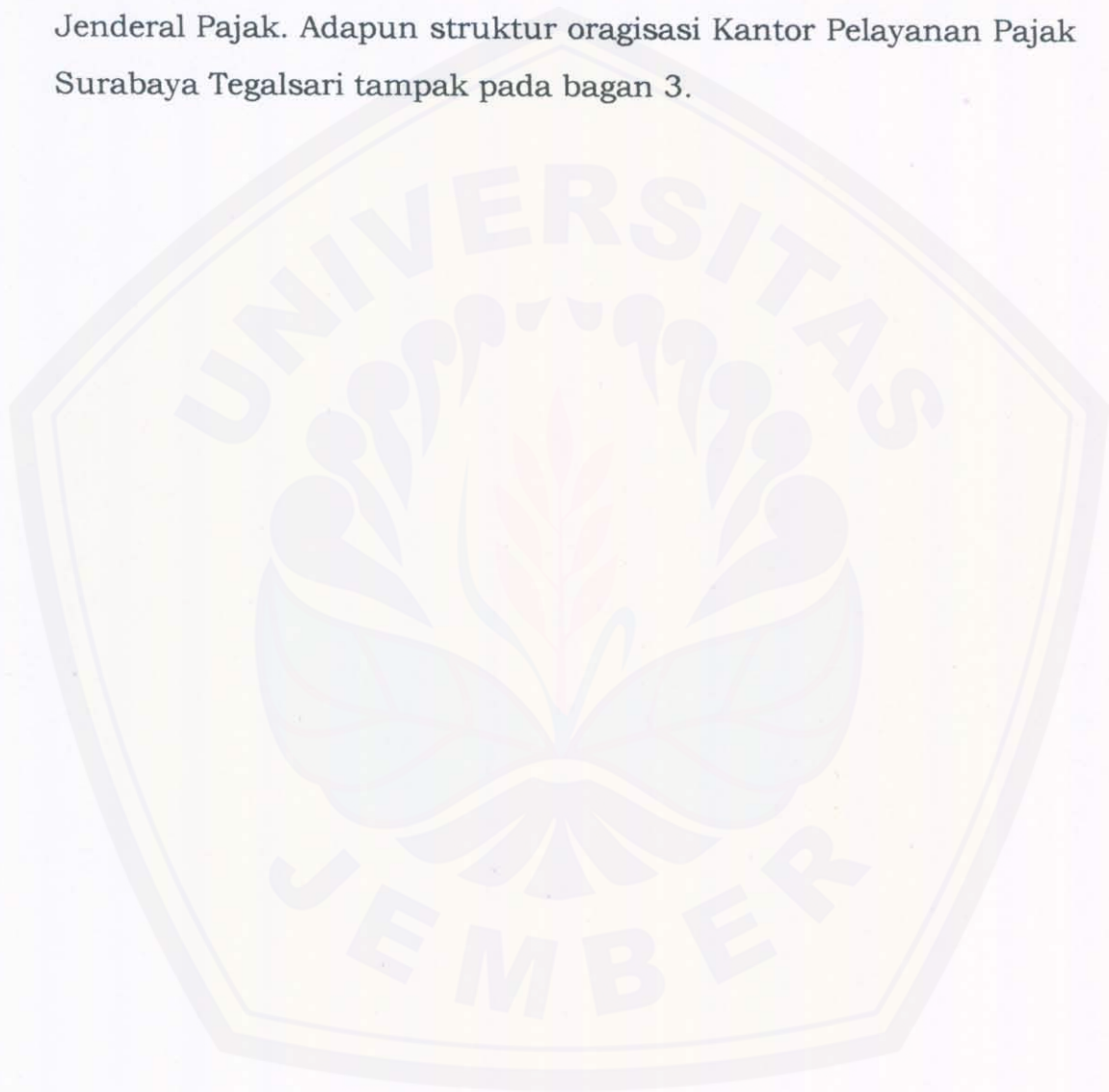
BAGAN II
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



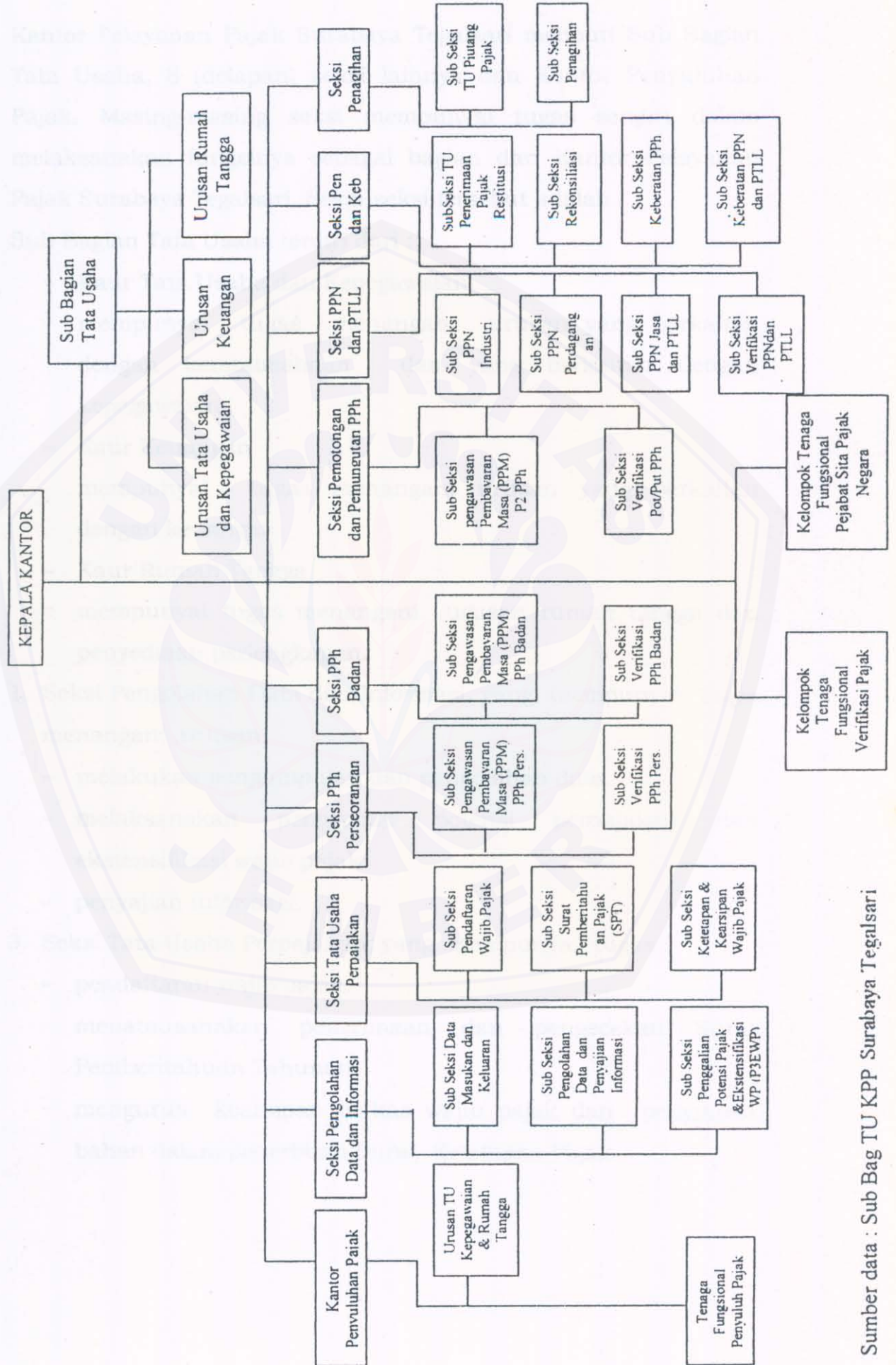
Struktur organisasi yang ada dalam Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 89/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989, dimana pemimpin tertinggi dijabat oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bertanggung jawab atas segala aktivitas pada seluruh bagian dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak bertanggung jawab langsung pada Kepala Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan RI.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak membawahi Kepala Seksi yang bertanggung jawab atas segala tugas dan fungsi yang ada pada seksinya. Kepala Seksi membawahi Kepala Sub Seksi yang

dibantu oleh beberapa staf dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kantor Pelayanan Pajak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dibidang PPh, PPn BM dan PTLL dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang ditarapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Adapun struktur oragisasi Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari tampak pada bagan 3.



**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAK SURABAYA TEGALSARI**



4. Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan, yang mempunyai tugas :

- melakukan urusan penatausahaan pembayaran masa dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Perseorangan
- menelaah dan menyusun laporan efektifitas pembayaran masa Pajak Penghasilan Perseorangan.
- verifikasi terhadap Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Perseorangan serta memeriksa wajib pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukkan Surat Pemberitahuan .
- Menangani urusan Fiskal Luar Negeri.

5. Seksi Pajak Penghasilan Badan, yang mempunyai tugas :

- menatausahakan pembayaran Pajak Penghasilan Badan.
- menerima, menatausahakan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Badan.
- menelaah dan mengevaluasi efektifitas pembayaran masa Pajak Penghasilan Badan.
- verifikasi terhadap Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Badan serta memeriksa wajib pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukkan Surat Pemberitahuan.

6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak, mempunyai tugas :

- memantau dan menatausahakan pembayaran masa atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.
- menerima dan memantau serta mengadakan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.

- menelaah dan menyusun laporan efektifitas pembayaran masa atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.
- verifikasi terhadap Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan. serta memeriksa wajib pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukkan Surat Pemberitahuan.

7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, mempunyai tugas :

- memantau dan menatausahakan pembayaran masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung lainnya.
- menerima, menatausahakan dan mengadakan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
- menelaah dan menyusun laporan efektifitas perkembangan Pengusaha Kena Pajak dan tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
- melakukan konfirmasi faktur pajak
- verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pengusaha Kena Pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan Surat Pemberitahuan Masa.

8. Seksi Penerimaan dan Keberatan, yang mempunyai tugas :

- melakukan rekonsiliasi dan pengolahan surat Setoran Pajak.
- menatausahakan penerimaan pajak.

- menyelesaikan keberatan.
 - menyelesaikan perselisihan perpajakan.
 - menyelesaikan urusan mengenai restitusi.
9. Seksi Penagihan, yang mempunyai tugas :
- menatausahakan piutang pajak.
 - mempersiapkan Surat Teguran dan pengurusan penagihan dengan surat paksa.

Kantor Penyuluhan Pajak merupakan pelaksana tugas Direktorat Jenderal Pajak di bidang penyuluhan perpajakan dan dikepalai oleh seorang kepala kantor yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Penyuluhan Pajak mempunyai tugas :

- memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan.
- memberikan konsultasi mengenai Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Bumi dan Bangunan.

4.3. Uraian Tugas Sumber Data Utama

Pada sub bab sebelumnya, telah penulis sampaikan uraian tugas dan fungsi dari masing-masing seksi yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari, termasuk pada seksi dimana erat kaitannya dengan pembuatan laporan ini yaitu seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Pada sub bab ini, penulis akan menyampaikan proses atau alur dokumen yang terjadi pada seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

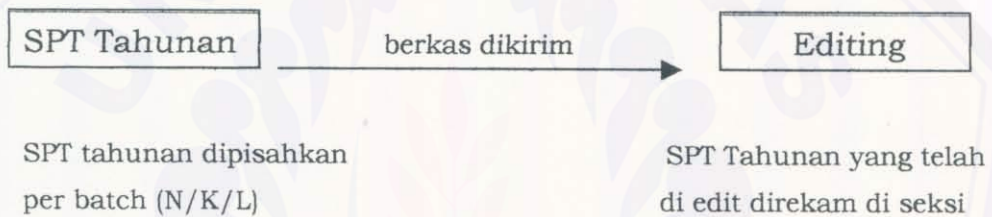


- I. Untuk Masukan (Input) , berdasarkan :
- Surat Pemberitahuan Masa.Orang Pribadi.
 - Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi.
 - Pembayaran angsuran
 - Pembayaran dari 100 Wajib Pajak besar.
 - Surat-surat lainnya.

II. Prosesnya dapat dilakukan dengan :

a. Manual

yaitu melakukan editing Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi.



b. Komputer

yaitu melakukan perekaman Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi & Lampiran.



Merekam Tanda Terima SPT Tahunan

elemen yang direkam :

- Tahun pajak.
- Form1770&Lampiran

- SPT Masa PPh Orang Pribadi

TPT

Seksi PPh



Elemen SPT Masa PPh yang direkam : - Langsung mengisi Tabelaris

- a. NPWP di Seksi PPh Orang Pribadi
- b. Jenis SSP
- c. Masa Pajak
- d. Disampaikan oleh
- e. Tanggal SSP
- f. Tanggal bayar bank
- g. Tanggal Laporan
- h. Jumlah laporan

III. Informasi / Keluaran (output)

3.1. Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 22

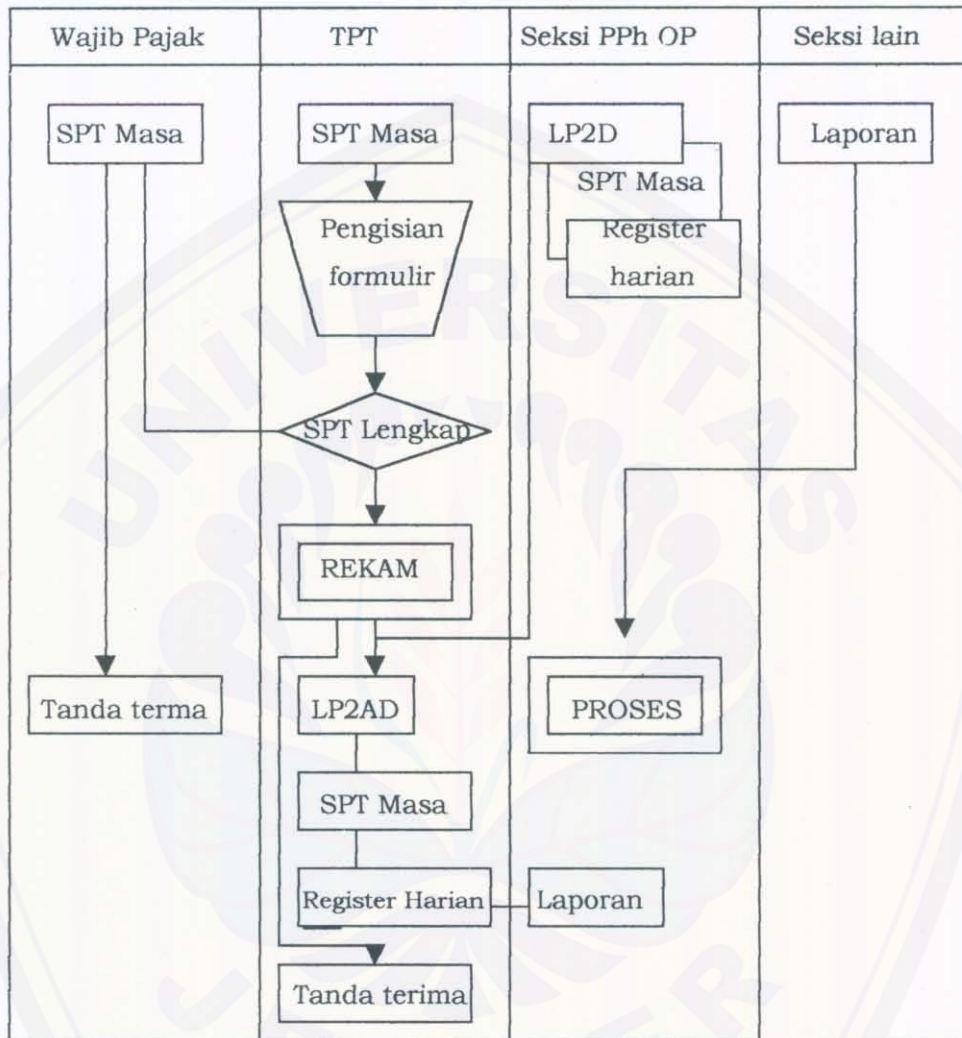
1. Sudah bayar / lapor.
2. Terlambat bayar.
3. Tidak lapor.
4. Belum bayar.

3.2. Melihat Tabelaris PPh Pasal 25.

3.3. Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Sudah bayar / lapor | 5. Tidak Laporan |
| 2. Kurang bayar | 6. Tidak Bayar / Laporan |
| 3. Terlambat bayar. | 7. Nominasi STP |
| 4. Terlambat laporan. | |

BAGAN IV
ALUR PENERIMAAN SPT MASA PPh ORANG PRIBADI



4.4. Permasalahan

Berdasarkan pengalaman magang yang telah penulis jalani, penulis menemukan permasalahan yang khususnya berkaitan dengan Fiskal Luar Negeri . Adapun persoalan mendasar yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari antara lain berkaitan dengan ketidakmampuannya dalam menarik Wajib

Pajak untuk mengkreditkan Fiskal Luar Negerinya pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

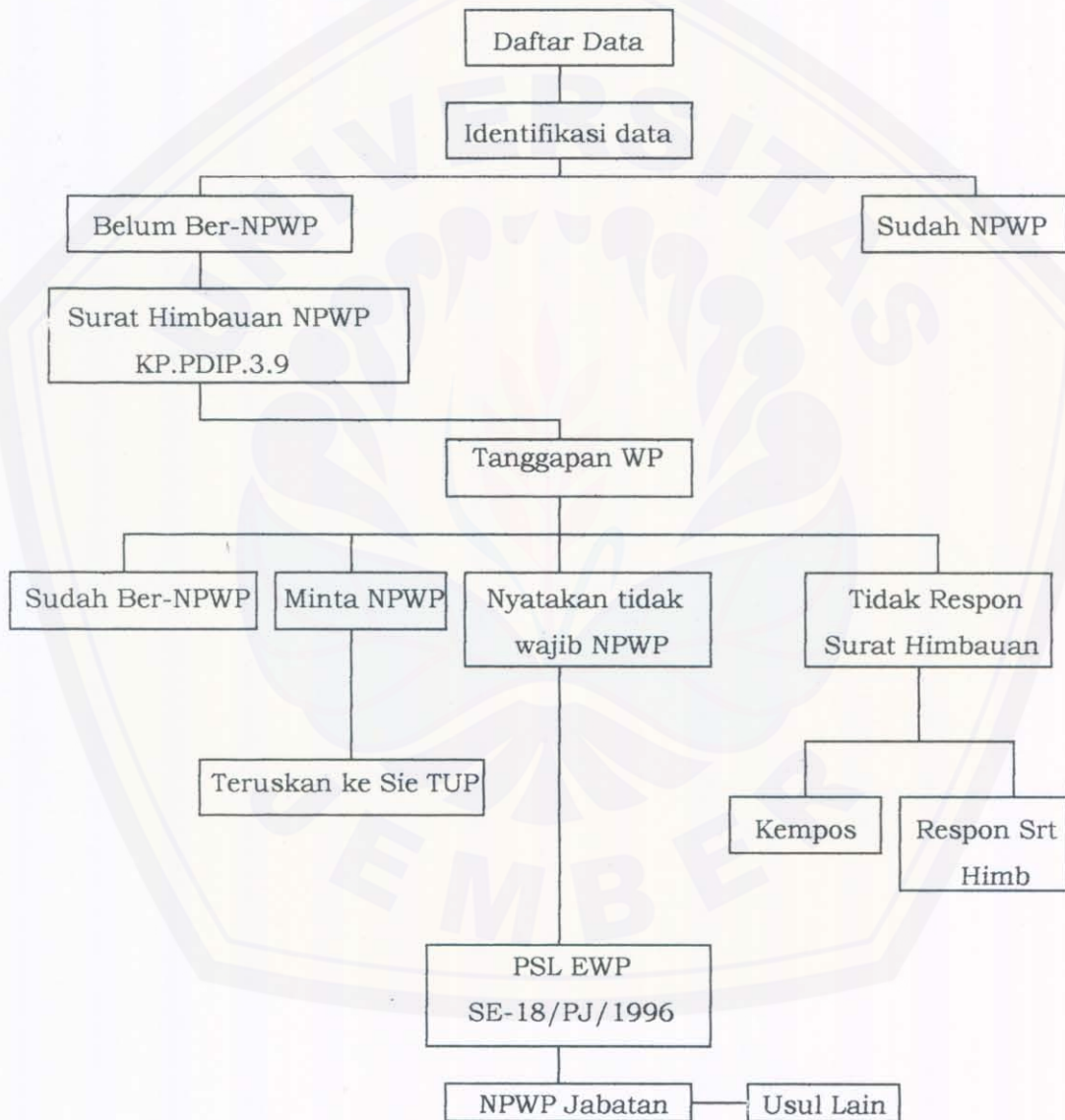
4.5. Pembahasan

Mengenai permasalahan diatas kiranya penulis dapat memberikan penjelasan bahwa, berlakunya kebijaksanaan fiskal pada mulanya dimaksudkan sebagai Surat Keterangan bahwa yang bersangkutan tidak lagi memiliki tunggakan pajak (tax clearance) Oleh karena itu setiap pemohon Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri tidak diwajibkan membayar pajak. Namun sejak tanggal 1 Januari 1994 yang merupakan awal tahun pembaharuan perpajakan nasional (Tax Reform), dengan diberlakukannya UU Pajak Penghasilan menggantikan Pajak Pendapatan dan Pajak Perseroan . Demikian pula mengenai Fiskal Luar Negeri juga mengalami perubahan dari sifat pembayaran final menjadi pembayaran dimuka, sehingga dapat dikreditkan Oleh karena itu pembayaran Fiskal Luar Negeri merupakan unsur pengurang dalam menghitung besarnya pajak yang harus dibayar pada akhir tahun, atau dapat dikreditkan dengan pajak akhir tahun dengan cara mengkreditkan melalui pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Panghasilan.

Sedangkan untuk mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan harus terlebih dulu terdaftar sebagai Wajib Pajak, dengan dibuktikan pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) . Dengan demikian terhadap mereka yang ingin dapat mengkreditkan pembayaran Fiskal Luar Negeri yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak , terlebih dahulu harus mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak . Inilah yang disebut

Ekstensifikasi. Proses pemanfaatan data ekstensifikasi tampak pada bagan V.

BAGAN V
PROSES PEMANFAATAN DATA EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK



NPWP dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi tingkat keseringan mereka yang pergi ke Luar Negeri . Misalnya

dimanfaatkan sebagai bukti kemampuan Wajib Pajak, sekaligus mencerminkan tingkat penghasilan wajib pajak. Kemanfaatan ini dapat dioptimalkan bila Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri diisi dengan lengkap.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi KPP Surabaya dalam pelaksanaan pemungutan Fiskal Luar Negeri diantaranya :

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam mengkreditkan Fiskal Luar Negeri pada Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilannya , padahal secara tidak langsung dengan pengkreditan fiskal luar negeri tersebut mengurangi jumlah kredit pajak wajib pajak yang harus dibayarkan.
2. Minimnya pengetahuan wajib pajak dalam hal pengkreditan pajak fiskalnya.
3. Ketakutan wajib pajak bila mengkreditkan fiskal luar negerinya dianggap sebagai wajib pajak potensial akan menambah kewajibannya membayar pajak sehingga pajak yang akan dipungut darinya akan semakin banyak.

Padahal seperti yang kita ketahui penerimaan dari Fiskal Luar Negeri ini jika dioptimalkan sebenarnya cukup besar sumbangannya bagi kas negara. Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik Surabaya, frekuensi / banyaknya orang pribadi yang keluar negeri sebanyak 2.067.442 yang menggunakan pesawat udara, belum lagi yang menggunakan sarana lain. Pada Laporan akhir ini penulis menggunakan sumber data yang berasal dari pelabuhan udara dikarenakan banyaknya orang yang ke luar negeri lebih dominan menggunakan pesawat udara jika dibandingkan dengan menggunakan sarana lain. Data mengenai frekuensi orang pribadi yang ke Luar Negeri tampak pada tabel dibawah ini.

TABEL II
LALU LINTAS PENUMPANG PENERBANGAN DALAM NEGERI
MENURUT ASAL DAN TUJUAN

Asal <i>Origin</i>	Tujuan <i>Destination</i>	Penumpang <i>Passenger</i>	Prosentase <i>Procentation</i>
Surabaya	Taipe	7.619	2,91 %
	Anchorage / int	0	0 %
	Bdr Sri Begawan	634	0,24 %
	Canton-Cina	4.826	1,84 %
	Darwin	0	0 %
	Hongkong	29.208	11,15 %
	Johor	2.182	0,83 %
	Johor bahru	11.104	4,24 %
	Kansai	24.421	9,33 %
	Kualalumpur	68.775	26,27 %
	Kuantan	0	0 %
	Manila	0	0 %
	Melbourne	0	0 %
	Singapura	113.052	43,18 %
	Vietnam	0	0 %
	Lainnya	0	0 %
	Jumlah	261.202	100 %

Sumber : Statistik Angkutan Udara tahun 1998

Selain dapat dilihat dari lalu lintas penerbangan dalam negeri, jumlah wajib pajak yang berangkat keluar negeri juga dapat dipantau malalui pelabuhan-pelabuhan udara yang ada di seluruh Indonesia. Lalu lintas penumpang untuk penerbangan luar negeri menurut pelabuhan udara tampak pada tabel III.

TABEL III
LALU LINTAS PENUMPANG UNTUK PENERBANGAN LUAR
NEGERI MENURUT PELABUHAN UDARA

Pelabuhan Udara <i>Airport</i>	Penumpang / Passenger		
	Berangkat <i>Departure</i>	Datang <i>Arrival</i>	Transit <i>Transit</i>
Bandung	14.765	16.484	0
Denpasar	1.194.313	1.090.740	97.776
Jakarta-Ckg	2.568.480	2.711.383	220.311
Medan	310.667	288.597	15.873
Surabaya	254.202	271.001	6.401
Jumlah	4.342.427	4.378.205	252.361

Sumber : Statistik Angkutan Udara tahun 1998

Tabel diatas menunjukkan bahwa di Surabaya tingkat keberangkatan warga dengan menggunakan pesawat udara adalah sebanyak 254.202 orang dalam tahun 1998. Disamping itu kedatangan warga pun nampak tidak berbeda jauh dengan keberangkatan yaitu 271.001 orang. Sementara dari data yang penulis peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari, untuk Wajib Pajak terdaftar yang berasal dari wilayah Tegalsari sendiri dalam tahun 1998 adalah sebanyak 22,800 Wajib Pajak baik yang efektif maupun yang non efektif. Itu berarti 8,97 % warga yang berangkat keluar negeri adalah wajib pajak Kantor pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari.

$$\text{Perhitungan : } \frac{22.800}{254.202} \times 100 \% = 8.97 \%$$

Untuk ukuran kota besar sebesar Surabaya penulis nilai jumlah wajib pajak yang hanya sebesar 22.800 sangatlah kecil jika

dibandingkan dengan jumlah penduduk kota Surabaya sendiri yang kurang lebih 2.695.784 jiwa. Sedang untuk wilayah Tegalsari sendiri sebesar kurang lebih 298.673 jiwa. (sumber BPS Surabaya tahun 1998) Itu artinya baru 11.16 % penduduk Tegalsari Surabaya yang terdaftar sebagai wajib pajak baik itu sebagai wajib pajak efektif ataupun sebagai wajib pajak non efektif.. Pada saat Bangsa Indonesia mengalami krisis moneter di awal tahun 1997 sampai sekarang banyak wajib pajak yang mengalami kerugian sehingga banyak yang kolaps khususnya pada wajib pajak yang mempunyai usaha sendiri. Itu yang menyebabkan sebagian kecil wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari menjadi wajib pajak non efektif dan mereka tidak menyampaikan kembali Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadinya . Namun sebagian besar wajib pajak masih menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilannya pada Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari .

Dari Surat Pemberitahuan wajib pajak yang masuk ke Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari , penulis amati jarang sekali para wajib pajak itu mengkreditkan Fiskal Luar Negerinya , padahal dilihat dari tingkat perekonomian penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari termasuk golongan ekonomi menengah keatas apalagi di lingkungan tersebut juga terdapat kantor Kedutaan Besar Amerika yang mana setiap hari penulis lihat banyak warga yang mengajukan visa dan paspor untuk berangkat ke luar negeri khususnya yang ke Amerika.

Banyaknya warga / penduduk Indonesia secara global yang berangkat keluar negeri juga dapat di pantau / dilihat dengan berdasarkan jenis paspor pada tabel IV dibawah ini :

TABEL IV
BANYAKNYA PENDUDUDUK INDONESIA YANG BERANGKAT
KE LUAR NEGERI MENURUT
JENIS PASPOR TAHUN 1998

Jenis Paspor <i>Kind of Passport</i>	Semester		<i>Jumlah</i> <i>Total</i>	Prosentase <i>Procentation</i>
	<i>I</i>	<i>II</i>		
Paspor Diplomatik	2.343	3.218	5.561	0.2 %
Paspor Dinas	18.667	15.889	34.556	1.48 %
Paspor Biasa	922.394	979.242	1.901.636	81.51 %
SPLP Paspor	33.362	31.448	64.810	2.78 %
Lainnya	35.290	12.959	48.249	2.15 %
WNA	139.018	139.018	278.036	11.92 %
Jumlah	1.151.074	1.181.774	2.332.848	100 %

Sumber : PT Angkasa Pura II

Tabel diatas menunjukkan bahwa secara garis besar jumlah penduduk Indonesia yang berangkat ke luar negeri yang paling banyak adalah yang menggunakan paspor biasa. Ini artinya penduduk yang berangkat keluar negeri adalah orang-orang pribadi. Yang mana mereka diwajibkan membayar Fiskal Luar Negeri untuk setiap kali keberangkatannya dengan jumlah dan tempat yang ditentukan dan telah penulis uraikan di bab sebelumnya. Sedang untuk mereka yang menggunakan baik Paspor Diplomatik ataupun Paspor biasa mereka terkena pengecualian untuk membayar Fiskal Luar Negeri (SE 15/PJ.41/1995).

Disamping keberangkatan penduduk ke luar negeri dapat dipantau melalui jenis paspor, banyaknya penduduk yang ke luar negeri dapat juga di tinjau dari Unit Pelaksana Teknis di masing-

masing daerah yang memiliki pelabuhan , bandar udara dan terminal-terminal keberangkatan ke luar negeri . Untuk Surabaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL V
BANYAKNYA PENDUDUK INDONESIA YANG BERANGKAT
KE LUAR NEGERI MENURUT
UNIT PELAKSANA TEKNIS TAHUN 1998

Unit Pelaksana Teknik (UPT)	Semester		Jumlah	Prosentase
	I	II		
Surabaya	46.000	32.141	78.141	91.2 %
Tanjung Perak	7.193	331	7.524	8.78 %
Jumlah	53.193	32.472	85.665	100 %

Sumber : PT Angkasa Pura II

Berdasarkan tabel diatas banyaknya penduduk Indonesia yang berangkat ke luar negeri melalui Surabaya (bandara, terminal-terminal keberangkatan) sepanjang tahun 1998 adalah sebanyak 78.141 orang atau sebesar 91,2 % . Untuk yang melalui pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sebanyak 7.524 orang atau sebesar 8,78 % . Itu berarti bahwa penduduk Surabaya untuk berangkat keluar negeri lebih sering menggunakan bandara atau pun terminal-terminal keberangkatan dibandingkan dengan menggunakan pelabuhan Tanjung Perak .

Adapun mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPP Surabaya Tegalsari dalam meningkatkan penerimaan dari Fiskal Luar Negeri adalah dengan melaksanakan penyuluhan-

penyuluhan tentang mekanisme pengkreditan Fiskal Luar Negeri, selain itu pemerintah dalam hal ini KPP Surabaya Tegalsari juga menjalin kemitraan dengan instansi-instansi terkait dalam hal ini dengan pihak Bank. Bank-bank yang ditunjuk tersebut berperan sebagai mitra kerja, khusus mengenai pembayaran Fiskal Luar Negeri. Sedangkan tanggung jawab untuk mengisi Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri adalah pihak bank yang ditunjuk. Oleh karena itu, pihak-pihak yang ditunjuk untuk mengisi Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri dengan lengkap sekaligus mencerminkan komitmen kemitraan oleh Bank sebagai mitra kerja Direktorat Jenderal Pajak. Sebab, kelengkapan mengisi Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri merupakan syarat mutlak berhasilnya Direktorat Jenderal Pajak mengoptimalkan pemungutan pajak. Dengan Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri yang lengkap dan disampaikan dengan tepat waktu kepada Kantor Pelayanan Pajak, Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri berfungsi sebagai alat ekstensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Penghasilan, yang akhirnya dapat menciptakan pemungutan pajak yang adil yang meliputi seluruh wajib pajak (Keadilan Horizontal) dan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan semestinya (Keadilan Vertikal), serta tepat pada waktunya.

4.6. Alternatif Pemecahan Masalah

- Mengadakan open house di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari

Maksudnya adalah agar wajib pajak dapat mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan seluk beluk perpajakan. Wajib pajak setelah mengetahui tentang seluk beluk perpajakan diharapkan secara sadar untuk melaksanakan kewajiban

perpajakannya . Disamping itu setelah open house, Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari juga hendaknya menindaklanjuti apa yang telah dilakukan sebelumnya yaitu dengan sering melaksanakan penyuluhan-penyuluhan secara kontinu.

- Memanfaatkan Media Massa

Artinya bahwa apa yang menjadi program di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari yang diperuntukkan bagi wajib pajak hendaknya memanfaatkan media massa sebagai sarana penyampaian informasi . Misalnya yang berkaitan dengan pemberitahuan bahwa Fiskal Luar Negeri dapat dikreditkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan orang pribadi dan dapat mengurangi jumlah pajak yang terutang pada akhir tahun pajak . Media massa memiliki keunggulan yang dalam waktu secara bersamaan dapat menyebarkan informasi kepada audiens dalam jumlah besar dan secara masal. Namun hal itu perlu penanganan yang profesional sehingga bagaimana pajak itu dapat diterima masyarakat dan masyarakat mau menindaklanjutinya. Yang jelas agar informasi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh masyarakat harus dilakukan melalui pendekatan yang tidak bertentangan dengan hati sanubari masyarakat dan dapat dirasakan manfaatnya serta dapat menciptakan pengertian (publik understand), koordinasi (publik coordinating) , kepercayaan rakyat (publik confidence) dan semangat kesatuan (publik supporting).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari uraian diatas akhirnya penulis dapat simpulkan bahwasannya :

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak di Indonesia khususnya Fiskal luar Negeri sudah cukup baik, namun masih ada sedikit kobocoran-kebocoran dalam hal pembayarannya . sepoerti yang dilansir Kakanwil IV Direktorat Jenderal Pajak Baharuddin di Jakarta .
2. Kekeliruan mendasar dari sistem perpajakan di negara berkembang adalah belum adanya / berfungsinya lembaga pengawas eksternal yang menyelesaikan semua permasalahan perpajakan secara independen dan profesional sehingga mampu menyelesaikan permasalahan secara cepat, tepat dan adil.
3. Aparat pajak harus bersikap profesional dalam melaksanakan tugasnya dimana mereka harus dapat memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat wajib pajak, namun tetap tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang telah ada.
4. Peningkatan kerja yang profesional mutlak harus dilakukan sehubungan dengan dihadapinya tugas Direktorat pajak yang berat dimana tiap tahun jumlah penerimaan yang diemban selalu mengalami peningkatan. Oleh karena itu upaya peningkatan penerimaan pajak tersebut harus dilakukan secara tertib

administrasi serta diadakan perluasan lapangan penerimaan pajak baru yaitu dengan melaksanakan Ekstensifikasi dan Intensifikasi pajak

5. Aparat pajak dihadapkan pada suatu tantangan dan sekaligus harus mampu menjadikan tantangan itu sebagai peluang untuk meningkatkan penerimaan negara. Adapun kendala yang perlu diperhatikan yaitu mengenai kondisi wajib pajak yang pada umumnya belum memahami tentang manfaat pajak, bahkan ada yang belum mengerti untuk apa pajak itu dibayarkan dsb.
6. Menghadapi kendala tersebut perlu diadakannya penyuluhan perpajakan, baik baik dari segi teknis penyuluhan yang efektif, frekuensi pelaksanaan penyuluhan sampai sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penyuluhan dll. Selain itu perlu juga adanya koordinasi antara pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dengan instansi terkait, disamping penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat wajib pajak serta perlunya pengawasan baik fungsional maupun pengawasan masyarakat.
7. Untuk melakukan penyuluhan dituntut adanya petugas-petugas pajak yang memahami peraturan-peraturan perpajakan dengan baik dan benar. Selain itu aparat harus mampu memberikan pelayanan dan pemahaman yang baik dan benar kepada masyarakat wajib pajak, yang akhirnya sampai pada kondisi dimana masyarakat wajib pajak paham betul tentang arti penting pajak bagi pembangunan negara, sehingga masyarakat akan

menyadari bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan dan bukan lagi merupakan suatu pemaksaan.

5.2. Saran

Saran untuk KPP Surabaya Tegalsari

- Untuk lebih meningkatkan penerimaan dari Fiskal Luar Negeri hendaknya oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak diadakan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PLS) yang mempunyai tujuan agar dapat menjaring wajib pajak nakal di bandara-bandara dan mencegah kebocoran-kebocoran seperti yang dilansir oleh Kakanwil IV Direktorat Jenderal Pajak Baharuddin di Jakarta.
- Perlunya pemberitahuan-pemberitahuan baik di bandara, pelabuhan laut dan terminal-terminal bahwa Fiskal Luar Negeri dapat dikreditkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak.
- Perlunya menggandeng mitra kerja lain dalam mengoptimalkan Fiskal Luar Negeri dalam hal ini pihak bank yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran Fiskal Luar Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, 1990, *Perpajakan*. cetakan keempat. Yogyakarta. Andi offset
- Ramelan, Arief K, *Awas Krisis Fiskal*, disampaikan dalam acara dialog Perpajakan Nasional di Kantor Pusat Ditjen Pajak pada tanggal 13 Juli 1999, berita pajak (1 Agustus 1999).
- Syachrudin, Ekky, *Pajak adalah Ujung Tombak dari Mekanisme Kebijakan Moneter dan Fiskal*, disampaikan dalam acara dialog Perpajakan Nasional di Kantor Pusat Ditjen Pajak pada tanggal 13 Juli 1999, berita pajak (1 Agustus 1999).
- Sutman, Tjepi, *Kebijakan Baru dan Antisipasi Global di Bidang Perpajakan*, disampaikan dalam acara Lokakarya Perpajakan di Hotel Kartika Chandra, 15 Juli 1999, Berita Pajak (1 Agustus 1999).
- _____, Undang-undang No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.
- _____. Undang-undang No. 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1971.
- _____, Penjelasan dan Peraturan yang berkaitan dengan kedua Undang-undang tersebut .
- _____, Peraturan pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan Undang-undang perpajakan tersebut.



Nomor : 2396 /PT.32.H4.FISIP/17'99 Jember, 14 Oktober 1999
 Lampiran : 1 (satu) bendel
 Perihal : Permohonan Ijin Magang Mahasiswa D-III Perpajakan
 FISIP Universitas Jember

Kepada Yth : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Tegalsari
 Jl. Dinoyo No. 111
 di -
 Surabaya 60008

Program Diploma Tiga (D-III) Perpajakan FISIP Universitas Jember dalam rangka pengembangan wawasan praktis mewajibkan setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 100 sks untuk mengikuti kegiatan Magang di Kantor Pajak selama 1 (satu) bulan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap adanya dukungan, bantuan, dan ijin agar mahasiswa D-III Perpajakan FISIP Universitas Jember yang akan melaksanakan magang dapat melaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak selama 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal 26 Januari 2000 s/d 26 Pebruari 2000.

Menunjuk Surat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pajak No. S-415/PJ.9/1998 tentang persetujuan kegiatan magang mahasiswa D-III Perpajakan FISIP Universitas Jember, maka dengan ini kami kirim nama mahasiswa D-III Perpajakan FISIP Universitas Jember yang ingin melaksanakan kegiatan magang di KPP Surabaya Tegalsari sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. Wisnu Poncosuryo | 97-1001 |
| 2. Yeny Taurusia | 97-1151 |
| 3. Hasibara Suryasanti | 97-1018 |
| 4. Titin Ponco W. | 97-1014 |
| 5. Budi Aji P. | 97-1083 |

Bersama ini kami lampirkan :

1. Dokumen kerjasama antara Dirjen Pajak dengan Rektor Universitas Jember.
2. Surat persetujuan Dirjen Pajak nomor: S-415/PJ.9/1998 tanggal 6 Agustus 1998 tentang Kegiatan Magang Mahasiswa D3 Pajak.
3. Surat Persetujuan Kakanwil Pajak nomor: S-637/WPJ. 09 /BG. 0102 / 1998 tanggal 21 Agustus 1998 tentang Kegiatan Magang Mahasiswa D3 Pajak Universitas Jember.

Atas bantuan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih sehingga kegiatan magang dapat mencapai sasaran yang kami harapkan, dan kami menunggu informasi lebih lanjut.

Toni T...
Wijayanti P.
 030 60078342

Tembusan kepada :

1. Kepala Pusat Pelayanan Pajak
 Direktorat Jenderal Pajak Jakarta.
2. Kepala Kantor Wilayah IX
 Jawa Timur di Surabaya.

br/srt-w/magang.msword



Dekan,
 Fakultas II

Mafnur Maryono
 130 531 992



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 331342 Jember 68121
Email : fispuncj @ jember.wasantara.net.id

N o m o r : 3047/PT32.H6.FISIP/17'99
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Pelaksanaan kegiatan Magang

Jember, 23 Desember 1999

Kepada : Yth Kepala KPP Tegalsari
Jl. Dinoyo No.111
di. -
SURABAYA

Menindak lanjuti persetujuan Surat saudara secara lisan melalui mahasiswa dan memperhatikan surat Kakanwil IX DJP Jawa Timur No. S-851 /WPJ.09/BG.0102/1999 tertanggal 26 Oktober 1999 perihal persetujuan permohonan kegiatan magang mahasiswa D-III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Pelayanan pajak Tegalsari Surabaya, maka dengan ini kami menugaskan mahasiswa untuk melaksanakan magang (Surat Tugas Terlampir) sesuai dengan jadwal.

Selanjutnya pengaturan jadwal dan pelaksanaan magang sepenuhnya kami serahkan kepada saudara sesuai dengan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku. Kami berharap selama melaksanakan magang mahasiswa diberi kesempatan untuk praktek disetiap seksi yang ada di KPP Regalsari

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih



Matnur Haryono
Dekan II,

NIP. 130 531 992

Tembusan kepada :

1. Kepala Pusat Penyuluhan Pajak
Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah IX DJP
Jawa Timur - di Surabaya

Surat Tugas

Nomor : 3049/PT32.U6.FISIP/1799

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
menugaskan kepada nama-nama di bawah ini :

No	Nama	NIM	Keterangan
1	Wisnu Poncosuryo	97-1001	Ketua
2	Hasibara Suryasanti	97-1018	Wakil Ketua
3	Yeni Taurusia	97-1151	Anggota
4	Titin Ponco W.	97-1014	Anggota
5	Yeni Dwi Anggraeni	97-1092	Anggota
6	Budi Aji P.	97-1083	Anggota

Untuk mengikuti Program Magang di Kantor Pelayanan Pajak Tegalsari Surabaya selama 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal 26 Januari sampai dengan 26 Februari 2000.

Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di Kantor Pelayanan Pajak Tegalsari Surabaya.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana semestinya.

Jember, 28 Desember 1999



Dekan II,

Matnur Waryono

NIP. 130 351 992

DEPARTEMEN KEUANGAN DAN PERENCANAAN
DIREKTORAT PERPAJAKAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK SURABAYA TEGALSARI

Jln. Dinoyo No. 111 GKN.II LL1-3
Surabaya Kode Pos 60265
Tromol Pos 821

Telepon : 5615369; 5615367
5615385 - 89
Faksimile : 5615367

Nomor : S. 02 /WPJ.09/KP.0601/2000
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa
Program Diploma III Perpajakan
FISIP Universitas Jember

27 Januari 2000

Yth. Para Kepala Seksi
Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari
Jalan Dinoyo No. 111
Surabaya

Menunjuk Surat Kepala Kantor Wilayah IX DJP Jawa Timur Nomor : S-851/WPJ.09/BG.0102/1999 tanggal 26 Oktober 1999 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami hadapkan mahasiswa Program Diploma III Perpajakan FISIP Universitas Jember yang ditugaskan untuk menjalani Praktik Kerja lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari untuk mendapatkan bimbingan seperlunya. (Nama dan Jadwal Praktek terlampir)

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. Kepala Kantor
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Drs. Sugeng Subiyanto
NIP 060042741

Tembusan :
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari

**DAFTAR REKAPITULASI KEHADIRAN NILAI AKTIVITAS PRAKTEK
PESERTA DIPLOMA III PERPAJAKAN
FISIP UNIVERSITAS JEMBER
MAHASISWA MAGANG TAHUN 1999 / 2000**

KPP SURABAYA TEGALSARI

FORM. A

NO	NAMA	NPM	ABSENSI					EFEKTIVITAS KEHADIRAN	NILAI	KET
			HADIR	IZIN	ALPA	TEPLAMBAT	PULANG CEPAT			
1.	Wisnu Poncosuryo	97-1001	28	--	--	--	--	100 %	100	
2.	Hasibara Suryasanti	97-1018	28	--	--	--	--	100 %	100	
3.	Yeni Taurusia	97-1151	28	--	--	--	--	100 %	100	
4.	Titin Ponco W.	97-1014	28	--	--	--	--	100 %	100	
5.	Yeni Dwi Anggraeni	97-1092	28	--	--	--	--	100 %	100	
6.	Budi Aji P.	97-1083	28	--	--	--	--	100 %	100	

Surabaya, 28 Pebruari 2000

A.n. Kepala Kantor
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Drs. Sugeng Subiyanto
NIP 060042741

FUKIM D

DAFTAR KEGIATAN/TUGAS PENILAIAN
 PESERTA PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
 FISIP UNIVERSITAS JEMBER
 MAHASISWA MAGANG TAHUN : 1999 / 2000

KPKIP P23 : Surabaya Tegalsari

NAMA : WISNU RAMOSOPHOTO
 NPM : 970903101001

NO.	TANGGAL	SEKSI/SUB	HARIKE DARI JAM SEMPAI JAM	TUGAS	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH	NILAI (ANGKA)	TANDA TANGAN KASIKASUBSI
		KELOMPOK	08.00 - 12.00					
1	26 JANUARI 2000	1. SUB DATA MASUKAN & KELUAR			mempelajari garis angka yang masuk		81	<i>[Signature]</i>
2	27 JANUARI 2000	2. SUB PENGALUAN POTENSI PIK & EKSTENSIFIKASI WADIB PADAL			mengetik data up baru berdasarkan data PBB		80	<i>[Signature]</i>
3	28 JANUARI 2000	3. SUB PENGALUAN DATA & PENYAJIAN INFORMASI			mempelajari, melaksanakan tugas sip di TPI	20	80	<i>[Signature]</i>
JUMLAH							241	
RATA-RATA *							80	

28 Januari 2000



Drs. Sugeng Subiyanto
 NIP. 060042741

KETERANGAN :
 RATA-RATA * = JUMLAH KOLOM 7
 JUMLAH TANGGAL KEHADIRAN

FURKIN D

DAFTAR KEGIATAN/TUGAS PENILAIAN
 PESERTA PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
 FISIP UNIVERSITAS JEMBER
 MAHASISWA MAGANG TAHUN : 1999 / 2000

KPI/KP PEB : Surabaya Tegalsari

NAME : WIGNU PONSOSURYA
 NPM : 9751023101001

NO.	TANGGAL	SEKSI/SUB	HARI KE DARI JAM SAMPAI JAM :	TUGAS	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH	NILAI (ANGKA)	TANDA TANGAN KASIKASUBSI
		TATA USAHA	PEPAJAKAN (TUGAS)					
1.	29 JANUARI 2000	1. SUB. NPWP PEJAK 2. SUB. SPT	08.00 - 12.00 08.00 - 12.00	1	mempelajari tata cara pendaftaran GPP mempelajari SE dan KUS dokumen mempelajari form dan surat subsi ketetapan 2 kartan		80	<i>[Signature]</i>
							90	<i>[Signature]</i>
							170	
					JUMLAH RATA-RATA *		85	

JANUARI 2000

A.n KEPALA KPI/KP PEB Surabaya Tegalsari
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Drs. Sugeng Subiyanto
 NIP. 060042741

KETERANGAN :
 RATA-RATA * = JUMLAH KOLOM 7
 JUMLAH TANGGAL KEHADIRAN

FORM B

DAFTAR KEGIATAN/TUGAS PENILAIAN
 PESERTA PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
 FISIP UNIVERSITAS JEMBER
 MAHASISWA MAGANG TAHUN : 1999 / 2000.....

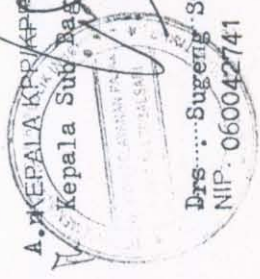
NAMA : WISNU POMOSOPHO
 NPM : 970903101001.....

KPIKPRBB : SURABAYA TEGALSARI

NO.	TANGGAL	SEKSI/SUB	HARI KE DARI JAM : 01.00..... SAMPAI JAM : 16.00.....	TUGAS	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH	NILAI (ANGKA)	TANDA TANGAN KASIKASUBSI
1	02 JAN 2000	SEKSI PEMBERIMAAN & KEBERATAN SUBSI. REKONSILIASI	1		MEMBUAT BAHAN HEADER " DAFTAR PEKAP " " KK 2C SPH TERIMA ANTARA KIP PEKAM SPP	200 LB 10 LB - 10 LB	85	
	03 JAN 2000	SUBSI KEBERATAN PPN & PPH		MEMPELJARI PENG AJUAN KEBERATAN DARI WP	MEMBERSIKAN KEBERATAN WP	10 LB - -	85	
	04 JAN 2000	SUBSI TUPPP <TATA USAHA PENERIMAAN & PESTISID Pajak >		MEMPELJARI WP BOKUMEN PIRUBIN TUPPA MEMPELJARI. PEMIN DAH BUKU WP.	MENGAMUKSI SKLB SMAHA DIBERITKANNYA SPMKP MEMGAMUKSI PERMOKOMAN PEMINDAH BUKUAN	10 LB - - 10 LB	85	
					JUMLAH RATA-RATA *		255 85	

04 JANUARI 2000.....

A. KEPALA KPIKPRBB : Surabaya Tegalsari
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Drs. Sugeng Subiyanto
 NIP. 060042741

KETERANGAN :
 RATA-RATA * = JUMLAH KOLOM 7
 JUMLAH TANGGAL KEHADIRAN

FORM B

DAFTAR KEGIATAN/TUGAS PENILAIAN
 PESERTA PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
 FISIP UNIVERSITAS JEMBER
 MAHASISWA MAGANG TAHUN : 1999 / 2000

KPP/KP PBB : Surabaya - Tegalsari

NAMA : *Widhi Purnasuryo*

NPM : 970903101001

NO.	TANGGAL	SEKSI/SUB	HARI KE DARI JAM SAMPAI JAM :	TUGAS	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH	NILAI (ANGKA)	TANDA TANGAN KASIH KASUBSI
	05 februari 2000	Sie. Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Tidak Langgung lainnya			mengoreksi DPP pd SPT masa PPN	36 berkas	79	<i>[Signature]</i>
	07 februari 2000	(PPN & PTL)			mengurutkan SSP masa PPN yg masuk ke KPP berdasar NPWP	35 lembar	78	<i>[Signature]</i>
	08 februari 2000				eksaminasi SPT masa PPN	36 berkas	79	<i>[Signature]</i>
JUMLAH							236	
RATA-RATA *							78,66	

08 Februari 2000

1. KEPALA KPP/KP PBB Surabaya - Tegalsari
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha

[Signature]

Drs. Subeng Subiyanto
 NIP. 060042741

KETERANGAN :
 RATA-RATA * = JUMLAH KOLOM 7
 JUMLAH TANGGAL KEHADIRAN

DAFTAR KEGIATAN/TUGAS PENILAIAN
 PESERTA PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
 FISIP UNIVERSITAS JEMBER
 MAHASISWA MAGANG TAHUN :/...../.....
 1999/...../.....
 2000

NAMA : Winda Poneorungo
 NPM : 970903101001

KPP/PPBB : Surabaya - Tegalsari

NO.	TANGGAL	SEKSI/SUB	HARI KE DARI JAM SAMPAI JAM	TUGAS	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH	NILAI (ANGKA)	TANDA TANGAN KASIKASUBSI
09	februari 2000	Sie Pajak Penghasilan			Menyortir SSP lembar 2	100 LB	80	<i>[Signature]</i>
					Mendata up berdasarkan			
					Klasifikasi lapangan			
					usaha			
10	februari 2000				mengisi tabularis PPh	50 LB	80	<i>[Signature]</i>
					orang pribadi			
					membuat perhitungan Bpk			
					krutang			
11	februari 2000				merekam SSP PPh OP	50 LB	80	<i>[Signature]</i>
					mempelajar data up ekspor			
					perincian PPh OP / GUN			
					rencana perencanaan PPh OP			
					JUMLAH		240	
					RATA-RATA *		80	

11 Februari 2000

A. KEPALA KPP/PPBB Surabaya - Tegalsari
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 Drs. Sugiyo Subiyanto
 NIP. 060042741

KETERANGAN :
 RATA-RATA * = JUMLAH KOLOM 7
 JUMLAH TANGGAL KEHADIRAN

DAFTAR KEGIATAN/TUGAS PENILAIAN
 PESERTA PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
 FISIP UNIVERSITAS JEMBER
 MAHASISWA MAGANG TAHUN : ...1999.../...2000...

KPK/PPB : Surabaya Tegalsari

NAME : Wisnu Pongosuko
 NPM : 970902101001

NO.	TANGGAL	SEKSI/SUB	HARI KE BERJAM SAMPAI JAM	TUGAS	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH	NILAI (ANGKA)	TANDA TANGAN KASIKASUBSI
1.	12 FEBRUARI 2000	PAJAL PENGHASILAN	BADAN (PPh BADAN)		menyortir ssp lembar ke 2 dan ke 3		80	
		1. SUB. PENGHASILAN	PEMBAYARAN		mendatai ssp lembar 2 dan 3 ke buku tabulasi (PPh 25)		80	
		MASA PPh - BADAN			mendatai ssp lembar 2 dan 3 ke buku tabulasi (PPh 25 final)		80	
JUMLAH						240		
RATA-RATA *						80		

Februari 2000

A.n. KEPALA KPP/PPB
 Tegalsari
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 Drs. Sugeng Subiyanto
 NIP. 060042741

KETERANGAN :
 RATA-RATA * = JUMLAH KOLOM 7
 JUMLAH TANGGAL KEHADIRAN

DAFTAR KEGIATAN/TUGAS PENILAIAN
 PESERTA PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
 FISIP UNIVERSITAS JEMBER
 MAHASISWA MAGANG TAHUN : 1999 / 2000

KPK/IKP PEB : Surabaya Tegalsari

NAME : MISNU POMCOSURYO
 N.P.M : 970903101001

NO.	TANGGAL	SEKSI/SUB	HARI KE DARI JAM SAMPAI JAM	TUGAS	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH	NILAI (ANGKA)	TANDA TANGAN KASIKASUBSI
1.	16 FEBRUARI 2000	PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN	DARI 08.00 - 12.00	SORTASI SSP LEMBAR MEMOTIR KEPUA	SURAT SETOR AN PAJAK PPH PASAL 21	100 LB	80	<i>[Signature]</i>
		1. SUB. PENGAWASAN PEMBAYARAN						
		MASA PEMOTONGAN 2 PEMUNGUTAN						
	17 FEBRUARI 2000	PPH			MERELAK SURAT SETORAN PAJAK KE KOMPUTER	100 LB	80	<i>[Signature]</i>
		2. SUB. VERIFIKASI PEMOTONGAN 2 PEMUNGUTAN PPH						
	18 FEBRUARI 2000				MEMBANTU NOTA MENGHITUNG AN. UNTUK MEMEBERIKAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)	100 LB	80	<i>[Signature]</i>
					JUMLAH		240	
					RATA-RATA *		80	

18 FEBRUARI 2000

A.n KEPALA KPP/IKP PEB Surabaya Tegalsari
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha

[Signature]

Drs. Sugeng Subiyanto
 NIP. 060042741

KETERANGAN :
 RATA-RATA * = JUMLAH KOLOM 7
 JUMLAH TANGGAL KEHADIRAN

DAFTAR KEGIATAN/TUGAS PENILAIAN
 PESERTA PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
 FISIP UNIVERSITAS JEMBER
 MAHASISWA MAGANG TAHUN : 1999 / 2000

KPK/KP P23 Surabaya Tegalsari

NAMA : Widya Pericosubyo
 NPM : 070903101001

NO.	TANGGAL	SEKSI/SUB	HARI KE DARI JAM SAMPAI JAM	TUGAS	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH	NILAI (ANGKA)	TANDA TANGAN KASIKASUBSI
1	19 Februari 2000	1. SUB. PENAGIHAN			mencatat STP PPh 21 ke DALAM KARTU 4.31		80	
		2. SUB. TATA USAHA PENAGIHAN			merekam bon penghapusan karena daluwarsa		80	
2	20 Februari 2000				Pengadministrasian surat kegiatan PPh		80	
					mencatat STP PPh ke dalam kartu 4.31			
					JUMLAH		240	
					RATA-RATA *		80	

di Tegalsari 1900

A.n KEPALA KPK/KP P23 Surabaya Tegalsari
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Drs. Sugeng Subiyanto
 NIP. 060042741

KETERANGAN :
 RATA-RATA * = JUMLAH KOLOM 7
 JUMLAH TANGGAL KEHADIRAN